



Islam dan Pancasila (Dialektika Hukum Tata Negara dalam Pemikiran Ali Hasjmy)

Mukhtar Amiruddin Ahmad^(1,a), Hafniati ^(2,b), Zulkifli
Abdurrahman Usman^(3,c)

¹STAI Al Washliyah Banda Aceh, Hafniati,

²Institut Agama Islam (IAI) Al Ghurabaa Jakarta

³Universitas Samudra (UNSAM) Langsa

amukhtar@staialwashliyahbandaaceh.ac.id; bhafzul74@gmail.com;

zulkifli82@unsam.ac.id

Abstract *This study examines Islam and Pancasila: The Dialectic of Constitutional Law in the Thought of A. Hasjmy. The purpose of this research is to reveal A. Hasjmy's thoughts related to Pancasila as the basis of the state and its relationship with Islam. This research method is qualitative by using descriptive analysis of A. Hasjmy's thoughts related to Islam, the state, and Pancasila. The analysis of A. Hasjmy's thought is analyzed using the heurmenetic method of trying to reveal the symbols of the text narrative expressed by A. Hasjmy. The data collection method of this study includes library research. Based on the library research method, the primary data in this study is a book by A. Hasjmy entitled Where is the Islamic State Located. This study shows that A. Hasjmy's thinking is modernist and adaptive. Modernist, A. Hasjmy's thinking is open and rational. Adaptive, A. Hasjmy is socially mature in understanding state culture. Pancasila, according to A. Hasjmy, is conceived with Islam; both divine teachings and social teachings. The precepts contained in Pancasila accommodate Islamic values. Indonesia, according to A. Hasjmy, has adhered to the principle of an Islamic state in the context of value substance based on Pancasila.*

Keywords: Islam, Pancasila, Law, State, Thought, and Ali Hasjmy

Abstrak Penelitian ini mengkaji Islam dan Pancasila: Dialektika Hukum Tata Negara dalam Pemikiran A. Hasjmy. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan pemikiran

Diterima:
05-11-2024
Direvisi:
12-12-2024
Dipublikasi:
20-01-2025

A. Hasjmy terkait Pancasila sebagai dasar negara dan relasinya dengan Islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisa deskriptif terhadap terhadap pemikiran A. Hasjmy terkait Islam, negara, dan Pancasila. Analisis terhadap pemikiran A. Hasjmy ditelaah menggunakan metode heurmenetik berusaha mengungkapkan simbol dari narasi teks yang diungkapkan A. Hasjmy. Metode pengumpulan data kajian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Berdasarkan metode *library research* tersebut data primer dalam penelitian ini adalah buku karya A. Hasjmy yang berjudul *Di Mana Letaknya Negara Islam*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran A. Hasjmy modernis dan adaptif. Modernis, pemikiran A. Hasjmy bersifat terbuka dan rasional. Adaptif, A. Hasjmy matang sosial dalam memahami budaya bernegara. Pancasila menurut A. Hasjmy terkonsepsi dengan Islam; baik ajaran yang bersifat ketuhanan maupun ajaran yang bersifat sosial. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila mengakomodir nilai-nilai keislaman. Indonesia menurut A. Hasjmy telah menganut asas negara Islam dalam konteks substansi nilai berdasarkan Pancasila

Katakunci: Islam, Pancasila, Hukum, Negara, Pemikiran, dan Ali Hasjmy

PENDAHULUAN

Polemik Pancasila sebagai dasar negara teelah berlangsung sejak Indonesia merdeka. Pertengkar ide tidak hanya terjadi di parlemen melainkan juga terjadi di luar kekuasaan. Polemik pancasila sebagai dasar negara mengemuka di tengah-tengah pemikir kebangsaan muslim. Ini disebabkan muslim mayoritas di Indonesia menginginkan dasar negara berlandaskan keislaman. Mencuatnya keinginan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) mengemuka di ruang publik. Pertengkar ide tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di parlemen melahirkan varian politi baru; yakni varian Islamis, nasionalis, dan sosial-ekonomi. Sementara polemik

di luar parlemen terjadinya konflik pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di bawah komando Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Jawa Barat. Dan, konflik pemberontakan ini pun berlanjut di Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muzakkar, dan di Aceh dipimpin Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Konsepsi negara sebagai organisme pengelolaan kehidupan berbangsa selalu hangat diperbincangkan. Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka dari penjajahan memelihara dasar negara sangatlah tajam. Namun demikian, mayoritas muslim di Indonesia tidak menjadikan polemik tersebut berlangsung lama. Ini disebabkan konsepsi negara dalam pandangan Islam lebih menekankan pada substansi nilai. Konsepsi moderat yang dibangun Islam dalam memahami berbagai instrumen hukum praksisnya sangat terbuka dengan hal-hal baru yang berhadapan dengan kehidupan manusia, termasuk dalam memahami instrumen politik dan dasar negara.

A. Hasjmy sebagai pemikir dan pelaku politik telah melewati tiga zaman dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia; era perjuang pra kemerdekaan, era kemerdekaan, dan era pemberontakan. A. Hasjmy juga pemikir multidimensi, ia tidak hanya terlibat sebagai pejuang kemerdekaan tetapi juga hadir sebagai sastrawan, tokoh pendidikan, waratawan, dai/pendakwah, tokoh politik, ulama, dan tokoh integrasi kebangsaan. Dalam sejarah pemberontakan Darul Islam Aceh, salah satu poinnya adalah membenturkan masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai keislaman dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

A. Hasjmy dalam catatan sejarah telah menjadi inisiator memperkokoh mosi integrasi nasional yang digagas Mohammad Natsir dari daerah. Artinya, kekuasaan yang selama ini dipaksakan dari atas ke bawah diperkuat oleh A. Hasjmy dari daerah. Sehingga, A. Hasjmy mampu

mendamaikan polemik terkait Pancasila sebagai dasar negara yang dipahami bertentangan dengan Islam dari luar lingkup kekuasaan. Sehingga, Pancasila diterima sebagai dasar negara tanpa menghilangkan pemahaman akan nilai-nilai keislaman di dalamnya, sehingga pemberontakan DI/TII di Aceh dapat dipadamkan melalui jalan damai. Di sini, dapat dipahami bahwa pemikiran A. Hasjmy terkait relasi Islam dan Pancasila menarik untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), yaitu sebuah metode yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang bersumber dari literatur tertulis, baik berupa buku, jurnal, maupun dokumen relevan lainnya. Dalam konteks ini, penelitian menjadikan karya A. Hasjmy yang berjudul *Di Mana Letaknya Negara Islam* sebagai sumber data primer. Buku tersebut dipilih karena relevansi dan otoritasnya dalam menjelaskan konsep negara Islam dari sudut pandang sejarah, politik, dan hukum Islam. Penelitian kepustakaan ini tidak hanya terbatas pada membaca dan mencatat, tetapi juga mencakup proses analisis kritis terhadap gagasan-gagasan utama yang termuat dalam karya tersebut untuk memahami relevansinya dalam konteks kajian hukum Islam kontemporer.

Lebih jauh, metode library research ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam berbagai ide, argumen, dan perspektif yang disajikan oleh A. Hasjmy. Dalam penelitian ini, data dari buku tersebut akan dikontekstualisasikan dengan teori-teori lain serta dibandingkan dengan literatur pendukung agar hasil kajian lebih komprehensif dan objektif. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menawarkan analisis tekstual, tetapi juga memberikan ruang untuk mengeksplorasi

relevansi dan kontribusi pemikiran A. Hasjmy dalam menjawab berbagai tantangan hukum Islam di era modern. Melalui metodologi yang terstruktur ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan bernilai guna bagi pengembangan kajian akademis di bidang hukum Islam.

PEMBAHASAN

Relasi Islam dan Pancasila

A. Hasjmy mengutarakan, begitu ketatnya hubungan antara agama dengan negara menurut ajaran Islam, sama padunya dengan pertautan tiang dengan gedung, karena memang agama adalah tiang negara. Karena itu, sesuatu konsepsi negara Islam yang kosong dari cita-cita kemasyarakatan dan politik negara, sebab kalo begitu halnya bukan lagi Islam namanya.¹ Politik menurut A. Hasjmy tidak harus dipisahkan dari agama. Karena kata Islam sendiri sudah mengandung politik. A. Hasjmy memahami terkait dengan kenegaraan dalam Islam merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri.² Islam yang berwenang menyusun segala cabang kehidupan manusia tidaklah mengatur sesuatu separuh-separuh keping demi keping, atau kepalang tanggung. Dasar-dasar negara Islam tidak akan dapat dimengerti sebaik-baiknya, sebelum “Cita Islam” dipahami dengan sebenar-benarnya, sebab negara adalah cabang utama dari Cita Islam itu sendiri.³

Konsep kenegaraan menurut A. Hasjmy memiliki nuansa tersendiri di antara para pemikir politik lainnya. Kendatipun landasan pemikiran politik A. Hasjmy tidak terlepas dari pemikiran para tokoh politik yang mendahuluinya, namun A. Hasjmy mempunyai corak

¹ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, (Susrabaya: Bina Ilmu, 1984), 53.

² A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, 7.

³ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam*, 33.

pemikiran tersendiri, tentang konsep negara Islam, walaupun terdapat pula persamaannya. Seperti halnya, sikap A. Hasjmy terhadap negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak pernah dipertentangkan dengan Islam. A. Hasjmy melihat, betapa pentingnya sebuah ideologi yang dapat mempersatukan Bangsa Indonesia dari kemajemukan agama, etnis, dan bahasa. Unsur-unsur yang ada dalam Pancasila dapat memberi jaminan dalam mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang di kehendaki oleh Islam. Pandangan inilah yang diserap oleh A. Hasjmy, selama bertahun-tahun di tengah-tengah masyarakat Aceh yang sangat kental dengan nilai religiusnya. Dalam konteks masyarakat Aceh, A. Hasjmy tidak pernah mempermasalahkan kemajemukan agama, meskipun rakyat Aceh dikenal sangat kental dengan semangat Islam dalam kehidupan kesehariannya. Dan hampir tidak pernah terjadi konflik antara umat beragama di tengah-tengah masyarakat Aceh.⁴

Terkait dengan cita Islam yang dibangun berdasarkan pandangan kenegaraan, setiap gerak perjuangan A. Hasjmy ditumpukan kepada bagaimana menciptakan masyarakat serta kebudayaan Indonesia baru yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵ Dalam konteks sejarah Islam datang di tengah-tengah umat manusia yang dikepung dengan berbagai macam kerusakan dari segala penjuru. Rusaknya aqidah dalam hubungan manusia dengan Tuhanya, dan rusaknya masyarakat yang menghubungkan manusia dengan manusia lainnya, sehingga masyarakat manusia lebih buas dari masyarakat binatang. Islam datang memperbaiki akidah dengan memastikan Ke-Esaan Allah yang seluas-luasnya, dan

⁴ Hasan Basri, *Melampaui Islam Substantif: Biografi Politik A. Hasjmy*, (Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015), 121.

⁵ A. Gazali, *Biografi Prof. Teungku Haji Ali Hasjmy*, (Jakarta: Socialia, 1978), 31.

memperbaiki kerusakan masyarakat dalam segala bentuk perbedaan derajat manusia. Seterusnya, Islam membimbing manusia ke arah cinta kasih, kerja sama untuk mencapai kebahagiaan, perdamaian, serta keadilan mutlak bagi umat manusia. Maka, atas dasar dan tujuan inilah menurut A. Hasjmy Islam membangun daulah atau negara. Negara yang berdasarkan “Cita Islam” yang tidak tergantung di awang-awang dan tidak pula hanya terhujam di bumi saja.⁶

Menurut A. Hasjmy, Islam melebihi dari ideologi manapun di dunia. karena itu A. Hasjmy tidak memandang Islam setara dengan ideologi sebuah negara. Suatu ideologi yang sesuai dengan ajaran agama adalah bagian dari Islam itu sendiri. Islamlah yang seharusnya menjadi sumber ideologi. Bukan menyetarakan agama dengan ideologi. Dari sisi ini tampak A. Hasjmy berbeda pandangan dengan Mohammad Natsir, yang mana pada awal kemerdekaan ingin menjadikan Islam sebagai ideologi negara dalam bentuknya yang formal. Memang A. Hasjmy tidak pernah mempersoalkan ideologi negara Indonesia, dan Pancasila dengan Islam. Menyangkut dengan persoalan ini, A. Hasjmy dalam berbagai tulisannya hampir tidak menyinggung tentang pentingnya Islam sebagai ideologi negara. A. Hasjmy memandang bahwa Islam sebagai agama yang bersifat universal, dan nilai-nilainya dapat diterapkan baik dalam kehidupan individu, sosial, maupun dalam kehidupan politik, dan tidak harus mengatasmakan Islam secara resmi.⁷

Bagi A. Hasjmy manusia sebagai pemegang amanah Tuhan untuk kesejahteraan umat manusia, negara dibangun atas semangat tauhid dan Ukhuwah Islamiyah. Dengan demikian, negara bukanlah tujuan akhir, negara hanyalah alat dan jalan untuk mencapai tujuan; yaitu untuk mencapai

⁶ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya...*, 50.

⁷ Hasan Basri, *Melampaui Islam Substantif: Biografi Politik A. Hasjmy...*, 122.

keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan umat. Dengan semangat Ukhuwah Islamiyah umat manusia yang terdiri dari berbagai suku bangsa harus bersatu dengan berkenalan satu sama lain. Dan mereka semua mempunyai derajat yang sama dalam kedudukan sosial, walaupun ada berlebih dan berkurang itu dikarekanan kemampuan bertakwa saja.⁸

Pemikir-pemikir Islam Indonesia, seperti Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, dan Munawir Sjadzali mengemukakan pemikiran-pemikiran teologis yang lain yang sebanding. Gagasan-gagasan mereka pada umumnya terfokus pada kenyataan bahwa Alquran, khususnya tidak memuat segala hal, apalagi menyediakan cetak biru kehidupan yang terperinci. Posisi pemikiran ini menegaskan pentingnya konsep *ijtihad* sebagai jalan untuk menafsirkan kembali atau mengaktualkan kembali doktrin-doktrin Islam sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, kelompok muslim harus mempertimbangkan pentingnya berbagai kekhasan lokal, konstektual dan temporal. Penganut aliran Mu'tazilah yang mengedepankan berpikir rasionalitas, Harun Nasution tegas menolak berbagai argumen yang menyatakan bahwa Islam mencakup segala hal. Meskipun ia mengakui kenyataan bahwa beberapa ayat tampak mengimplikasikan watak Alquran yang serba mencakup dan serba menjelaskan. Namun, tetap berpandangan bahwa asumsi itu tidak didukung oleh realitas Alquran itu sendiri.⁹

Mahfud MD., dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) mengutarakan bahwa negara Indonesia merupakan produk ijtihad yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan zaman yang ditetapkan oleh para ulama bersama para pendiri negara memilih negara inklusif berdasarkan

⁸ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya ...*, 51.

⁹ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 144.

Pancasila. Memahami konteks zaman dan realitas politik modern berdasarkan sumber ajaran Islam. Dasar hukum modern diambil dari kaedah hukum “la yunkaru taghayyiril ahkam bi taghayyiril azman wal amkan wal awai” hukum itu berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan waktu, serta budaya.¹⁰

Ijtihad politik untuk menafsirkan kembali kebutuhan masyarakat dalam kontek aktualisasi kebangsaan, Indonesia dengan azas Pancasila adalah perumusan silang politik dan kebudayaan. Pancasila merepresentasikan nilai-nilai perjuangan ke-Indonesiaan. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi titik kunci dalam menguraikan segala bentuk kerumitan kebangsaan. Pancasila mesti melandasi setiap sendi dan elemen kehidupan berbangsa, sebagai jiwa sekaligus raga, ia nafas dan nyawa bagi kebangsaan.¹¹ Perdebatan tentang Pancasila sudah melewati masa yang sangat panjang, gagasan tentang Pancasila sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Pro dan kontra mengiringi dinamika perjalanan sejarah Indonesia. Namun satu hal yang penting dicatat, sebagaimana ditegaskan oleh Nurcholish Madjid, Pancasila telah menunjukkan ke-efektifannya sebagai penopang bagi bangsa ini. Walaupun demikian, bukan berarti Pancasila sudah sepenuhnya operasional dan mengisi semangat zaman.¹²

¹⁰ Indonesia Lawyer Club dalam tema “#ILCMenangis dan Tertawa”, Pada Tanggal 30 Oktober 2019, <http://bit.ly/2PqGbvB>.

¹¹ Febri Hijroh Mukhlis, “Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama,” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No. 2, (2016): 171-186, <https://media.neliti.com/media/publications/62019-ID-teologi-pancasila-teologi-kerukunan-umat.pdf>.

¹² M. K. Ridwan, “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi,” *Dialogia*, Vol. 15, No. 2, (2017): 199, <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/1191>.

Dialektika Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Membangun dialektika Pancasila sebagai ideologi terbuka menarik untuk dipahami. Tradisi dialektika semacam ini dapat menjembatani keberadaan Pancasila tetap terpelihara serta dapat membangun rekonstruksi pemikiran yang memiliki relevansi tanpa kehilangan substansi Pancasila itu sendiri. Jika pemikiran tentang Pancasila ini dibangun atas semangat mendasari ideologi Pancasila sebagai azas berbangsa tanpa harus menghilangkan peran utama dan konteksnya, sehingga dalam membangun peran logika komunikatifnya tidak terlepas dari semangat konsepsi Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Senada dengan pemikiran Cak Nur tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Joko Siswanto menguraikan, melalui pengembangan pemikiran-pemikiran baru ideologi tersebut dapat memelihara makna dan relevansinya tanpa kehilangan hakikatnya, sehingga ideologi tersebut beserta nilai-nilai dasarnya tetap berbunyi dan komunikatif dengan masyarakat yang terus berkembang dan dinamika kemajuan zaman yang terus bergerak. Dengan begitu, ideologi tersebut akan menzaman, tahan uji, dan malahan semakin berkembang bersama-sama dengan realitas baru yang terus bermunculan”.¹³

Namun, seiring dengan banyaknya kegagalan pemerintah dalam membangun negara terdapat kelompok-kelompok ekstremis yang ingin mengubah Pancasila dengan Syariat Islam.¹⁴ Terlepas dari pemberontakan-pemberontakan regional yang dikibarkan di bawah bendera Islam tersebut, hubungan politik antara Islam dan negara

¹³ Ngainun Naim, “Islam Dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2015): 436-456, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/90>.

¹⁴ M. K. Ridwan, “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi,” *Dialogia*, Vol. 15, No. 2, (2017): 199, <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/1191>.

tetap baik. Dijadikannya Pancasila sebagai ideologi negara tidak dianggap sebagai perwujudan dari keinginan untuk memisahkan agama (Islam) dari negara. Bahkan dengan dimasukkannya pernyataan monoteistik “Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁵ ke dalam dasar negara maka Indonesia telah dipandang sebuah “negara Islam”.¹⁶

A. Hasjmy dengan konsepsi negara Islam memahami, menurut ajaran Islam bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah untuk mengurus kerajaan bumi.¹⁷ Berdasarkan asumsi ini, masuk pernyataan monoteistik “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam ideologi negara, A. Hasjmy menyimpulkan bahwa, Indonesia adalah “negara Islam” dengan Pancasila sebagai dasarnya. Walaupun hal yang demikian, diawal-awal kemerdekaan banyak dipertentangkan oleh tokoh-tokoh lainnya. Termasuk pendahulunya Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Snouck Hugronye, seorang sarjana Belanda mengemukakan bahwa, tuduhan yang paling kejam dan tidak beralasan sama sekali adalah tentang Islam dan politik. Terutama sekali tuduhan ini dibesar-besarkan oleh kaum kolonialis imperialis, untuk menjauhkan umat Islam di daerah-daerah jajahnya dari pengaruh politik. Termasuk di Indonesia. Menurut Hugronye, Belanda pada permulaan abad ke-XX berusaha dengan sungguh-sungguh untuk

¹⁵ Peletakan Sila pertama Pancasila dengan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan ideologi negara merupakan kemenangan para ideolog Muslim Indonesia. Nilai Pancasila telah mengadopsi ideologi utama Islam yaitu Tauhid. Tauhid adalah dasar utama dalam sokoguru bangunan ajaran Islam. Ideologi Islam yang berazaskan Tauhid telah diterapkan oleh para bapak pendiri bangsa dengan meletakkannya pada Sila pertama Pancasila. Fuad, Fokky, “Islam dan Ideologi Pancasila: Sebuah Dialektika”, *Lex Jurnalica*, Vol. 9, No. 3, (Desember 2013): 164-170, <https://fh.uai.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Islam-dan-Ideologi-Pancasila-Sebuah-Dialektika-.pdf>2012.

¹⁶ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara...*, 100-101.

¹⁷ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya...*, 51.

membasmi semangat jihad umat Islam di Aceh dan daerah-daerah lainnya yang menentang penjajahan.¹⁸

Walaupun baru dicetuskan pada tahun 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Pancasila sebetulnya sudah berlaku dalam praktik sehari-hari masyarakat Indonesia. Soekarno tidak mengarang bebas ketika ia mencetuskan Pancasila pada sidang BPUPKI. Soekarno tidak mereka-reka Pancasila dari angan-angannya sendiri. Dalam mencetuskan Pancasila, Sang Proklamator merangkum pengalaman berjuang bangsa Indonesia melawan penjajahan. Ia membaca sejarah bangsa Indonesia yang hidup sengsara di bawah penjajahan Belanda. Ia mempelajari bagaimana rakyat Indonesia ditindas oleh para priyayi setempat yang mengabdikan pada Belanda. Soekarno menyelidiki sebab-sebab kenapa penjajahan bisa menimpa bangsa Indonesia. Kemudian Soekarno memperhatikan juga usaha-usaha mandiri bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya.¹⁹

Sejak jaman kerajaan dan masuknya agama-agama besar di Nusantara, unsur-unsur Pancasila sebagai kebudayaan Indonesia sudah ada dalam kehidupan masyarakat, terutama terkait dengan sistem kepercayaan. Kehadiran pengaruh budaya luar pada waktu itu berjalan secara damai, tanpa intimidasi apalagi melalui kekerasan, sehingga hubungan di antara kedua budaya itu terjalin dan dapat berlangsung secara harmonis. Pada masa kerajaan Majapahit cukup banyak karya sastra bernilai tinggi berhasil diciptakan. Di antara sekian banyak karya sastra, ada dua

¹⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam II: Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 33.

¹⁹ Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, *Kisah Pancasila*, (Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017), 8-9.

karya sastra yang sangat terkenal kala itu yaitu: kitab “Negarakertagama” yang dikawi oleh Mpu Prapanca, dan kitab “Sutasoma” yang dikawi oleh Mpu Tantular. Dalam buku Negarakertagama terdapat istilah “Yatnaggegwani Pancasyiila Kertasangkar bhisekaka Krama”. Artinya, raja wajib menjalankan dengan setia kelima pantangan, begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan. Sementara dalam kitab Sutasoma terdapat istilah “Pancasila Krama”, artinya lima dasar tingkah laku atau perintah kesusilaan. Pancasila Krama ini juga sering disebut “Ma Limo”, mencakup. *Pertama*, dilarang mateni (membunuh). *Kedua*, dilarang maling (mencuri). *Ketiga*, dilarang madon (berzina). *Keempat*, dilarang mabok (minum-minuman keras). *Kelima*, dilarang main (berjudi). Kelima ini menjadi pedoman tingkah laku yang wajib ditaati.²⁰

A. Hasjmy, dalam bukunya “*Di Mana Letaknya Negara Islam*” yang memuat uraian tentang dasar-dasar negara, sistem pemerintahan, sistem demokrasi, dan sebagainya. Ketika memahami tentang konsepsi “negara Islam” sangatlah modernis. A. Hasjmy lebih melihat keberadaan negara dari sisi substansi ajarannya, sehingga konsepsi politik Islam dapat dipraktekkan atau dipergunakan dalam negara manapun di dunia ini, dengan tidak perlu negara tersebut mengambil Islam menjadi dasarnya. Artinya, negara itu tidak harus menjadi “negara Islam”, seperti halnya sejumlah negara yang memakai unsur-unsur tertentu dari Demokrasi Liberal Barat, atau Demokrasi Rakyat Sosialis, sementara negara tersebut tetap menjadi “Negara Nasional, “Negara Sosialis”,²¹ Negara Kapitalis”,²² “Negara

²⁰ Ida Bagus Brata, Ida Bagus Nyoman Wartha, “Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia”, *Jurnal Santiqji Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2017): 120-132, <http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/JSP/article/view/800/745>.

²¹ Tom P. Harsanyi, “Social Democracy,” in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (Elsevier, 2015), 242–

Islam”,²³ “Negara Hindu”,²⁴ “Negara Budha”,²⁵ dan yang lainnya. Apabila mempelajari dan meneliti hal-hal yang berlaku dalam negara-negara yang mempergunakan sistem Demokrasi Liberal Barat dan Sistem Rakyat Sosialis akan ditemukan di dalamnya unsur-unsur hukum tata negara menurut ajaran Islam.²⁶

Menurut A. Hasjmy, dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila juga terdapat unsur-unsur tertentu dari sistem demokrasi liberal Barat, atau sistem Demokrasi Rakyat Sosialis, ataupun sistem Demokrasi Islam, maupun sistem yang lainnya yang tidak bertentangan dengan jiwa dan hakikat Pancasila. Unsur-unsur tata negara menurut ajaran Islam sebagaimana yang telah diuraikan A. Hasjmy menjadi bahan untuk menyempurnakan “Hukum Tata Negara” dari Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terus menerus membebaskan dirinya dari pengaruh hukum warisan kolonial Belanda. Berdasarkan pemikirannya tentang konsepsi negara Islam, bersama dengan masyarakat yang

244, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780080970868931283>.

²² Joan Huber Rytina and Ralph Miliband, “The State in Capitalist Society.,” *American Sociological Review*, No. 35, No. 5 (October 1970): 931, <http://www.jstor.org/stable/2093322?origin=crossref>.

²³ I. M. Lapidus, “State And Religion In Islamic Societies,” *Past & Present*, Vol. 151, No. 1, (1996): 3-27, <https://academic.oup.com/past/article-lookup/doi/10.1093/past/151.1.3>.

²⁴ Sherry Ann Singh, “Hinduism and the State in Trinidad,” *Inter-Asia Cultural Studies*, Vol. 6, No. 3, (2005): 353-365, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14649370500169987>.

²⁵ Frederic L. Pryor, “A Buddhist Economic System-in Practice.,” *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 50, No. 1 (January 1991): 17–32, <http://doi.wiley.com/10.1111/j.1536-7150.1991.tb02481.x>.

²⁶ Alchaidar, “Negara, Islam, Dan Nasionalisme Sebuah Perspektif”, *Kawistara*, Vol. 3, No. 1, (April 2013): 41-57, <https://book.asia/book/2719895/900473>.

lainnya A. Hasjmy menyepakati Indonesia tetap menjadi negara Pancasila.²⁷

Pancasila Sebagai dasar Negara

Sebagaimana disampaikan Amir Hamzah,²⁸ A. Hasjmy sebagai tokoh agamis dan nasionalis ini, mengikuti jejak gurunya, Mahmud Yunus (seorang ulama reformis yang sangat mengagumi Muhammad Abduh), A. Hasjmy sering menyebut nyebut nama gurunya, A. Hasjmy sangat mengagumi M. Yunus. Artinya pandangan A. Hasjmy dengan gurunya sama, bersifat agamis dan nasionalis. Mengenai Pancasila, sebagaimana dijelaskan oleh Amir Hamzah, A. Hasjmy sebagai seorang dosen sering diucapkan pada mahasiswanya.

Pertama, bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam, bahkan setiap sila bersesusain dengan prinsip nilai dalam Islam, setiap sila terpaut dengan ayat Alquran. Sebagai contoh sila pertama A. Hasjmy mengaitkan dengan surat al-Ikhlâs.²⁹ *Kedua*. Pancasila diramu oleh orang-orang

²⁷ A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya...*, 11.

²⁸ Amir Hamzah adalah salah seorang mahasiswa yang pernah belajar di IAIN (UIN) Ar-Raniry bersama A. Hasjmy, putra Aceh seorang pegiat sejarah, kolumnis, wartawan, politisi, dan juga sebagai ustadh yang mengisi pengajian rutin di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dengan Materi Sejarah Kebudayaan Islam pada tiap mingguan ba'da subuh hari kamis.

²⁹ Hal ini berbeda dengan Teungku Muhammad Daud Beure'eh, seperti dikutip Esposito, pernah berkata bahwa: "Agama Islam yang membuat kehidupan umat sempurna tidak boleh dipisahkan antara satu aspek dengan aspek kehidupan lainnya. Sila pertama dari Pancasila, percaya kepada "Tuhan Yang Maha Esa" itu tidak lebih dari manuver politik belaka. Menurut Daud Beure'eh Yang paling esensial dari sumber kehidupan dan sumber apapun haruslah merujuk pada Kitabullah dan Sunnatullah secara kaffah. Tidak mungkin sebagian mengikutinya, tetapi sebagian lain tidak, baik dalam tindak kriminal, urusan kemasyarakatan, peribadatan, atau dalam segala persoalan harian. Jika hukum Tuhan tidak kita laksanakan dengan sempurna, berarti kita mengingkari kepercayaan-

Islam, dalam kajian filosofis, setiap manusia tidak bisa di pisahkan oleh agama dan keyakinannya. Oleh karena Pancasila diciptakan oleh orang Islam maka Pancasila terinspirasi dengan keyakinan agama mereka. A. Hasjmy beranggapan bahwa perumus Pancasila terdiri atas orang-orang Islam, di antaranya: Muhammad Yamin, Abi Kusno, Mr. Moehamad Hasan, H. Agussalim, Soekarno, Mohammad Natsir, Wahid Hasyim, Hamka, dan beberapa yang lainnya.³⁰ A. Hasjmy, sebagai ulama modernis yang memiliki visi mirip dengan Pan-Islamisme, tentunya posisinya sebagai “Muslim Haraki” memiliki kemampuan dalam menerjemahkan konteks kenegaraan modern yang tertuang dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai landasannya.³¹

Pancasila berarti Lima Sila, yang berasal dari kata bahasa Sansekerta Jawa (panca: lima dan sila: asas), digunakan oleh para pendiri bangsa untuk menyebut lima sila yang menjadi landasan bangsa Indonesia. Kelima prinsip tersebut. *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, kemanusiaan yang adil dan beradab. *Ketiga*, persatuan Indonesia. *Keempat*, demokrasi yang berpedoman pada kearifan dalam konsultasi perwakilan. *Kelima*, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila telah menjadi landasan filosofis, politik, sosial negara dan masyarakat Indonesia yang bertahan dari era Revolusi kemerdekaan bangsa di bawah Sukarno (1945–1966) hingga masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto (1966–1998) ke-era

Nya sehingga menyebabkan kita sesat sepanjang hayat”. Lihat, M. Shabri Abd. Majid, “Revitalisasi Pendidikan Aceh, *Jurnal Pencerahan*, Vol. 10, No. 2, (September 2016): 62–73, <https://cor.e.ac.uk/download/pdf/289863389.pdf>.

³⁰ Wawancara dengan ustadh Amir Hamzah pada tanggal 24 Maret 2020.

³¹ Saifuddin Duhuri, *Dayah Menapaki Jejak Pendidikan Warisan Endatu Aceh*, (Banda Aceh: Lhee Sagoe Press, tt.), 20.

Reformasi yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 lalu.³²

Apabila Garuda yang jadi lambang negara kita berasal dari tahun 1950, Pancasila punya riwayat yang jauh lebih panjang. Pada tahun 1945, para pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Lima sila itu adalah landasan tempat kita berpijak dalam segala hal yang berhubungan dengan hidup bernegara. Setiap warga negara tentu merdeka untuk mengutarakan pikiran dan pendapatnya sendiri. Akan tetapi, kalau sudah menyangkut persoalan bernegara dan hidup bersama sebagai anggota dari negara, maka kita wajib berpedoman pada Pancasila. Semua aturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah harus bisa dirunut asal-muasalnya dalam semangat kelima sila dalam Pancasila. Itulah maksudnya Pancasila sebagai dasar negara.³³

Islam dan Pancasila seringkali diperdebatkan dan dibenturkan dan keduanya acapkali dianggap sebagai dua kutub ideologi yang saling berseberangan. Perlunya sebuah kesadaran akan pemaknaan hubungan antara Islam dan Pancasila. Proses dialogis antara Islam dan Pancasila merupakan sebuah perjalanan panjang sejarah Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam.³⁴

Bila dilihat dari artikulasi politik dan pandangan-pandangan kenegaraan A. Hasjmy yang moderat namun

³² Adam Possamai and Anthony J. Blasi, "Pancasila," in *The SAGE Encyclopedia of the Sociology of Religion* (2455 Teller Road, Thousand Oaks, California 91320: SAGE Publications, Inc., 2020), <https://sk.sagepub.com/refere nce/the-sage-encyclopedia-of-sociolo gy-of-religion/i7701.xml>.

³³ Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, *Kisah Pancasila...*, h. 8.

³⁴ Fuad, Fokky, "Islam dan Ideologi Pnacasila: Sebuah Dialektika", *Lex Jurnalica*, Vol. 9, No. 3, (Desember 2013): 164-170, <https://fh.uai.ac.i d/wp-content/uploads/2016/02/Is lam-dan-Ideologi-Pancasila-Sebuah -Dialektika-.pdf>2012.

tradisionalis, maka itu adalah hal yang wajar, karena di samping semangat nasionalisme yang kental, juga menempatkan Pancasila sebagai bagian dari ideologi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³⁵ sebagai sosok pengagum Soekarno A. Hasjmy, sebagaimana dijelaskan oleh Amir Hamzah, menguraikan bahwa, Islam itu ibarat lapangan bola sangat luas, sedangkan pancasila ibarat bola, kecil dan hanya sedikit urain dari Pancasila diambil dari nilai-nilai Islam. Berdasarkan asumsi ini, menurut A. Hasjmy tidak boleh mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam. Pancasila berlaku di Indonesia sebagai pemersatu bangsa,³⁶ sementara Islam nilai yang bersifat rahmatan lil 'alamin. Kesimpulan yang menarik dari alur paham A. Hasjmy tentang Pancasila, menyatakan "seorang Muslim yang telah mengamalkan agamanya dengan baik, justru dengan itu, sekaligus dia telah mengamalkan Pancasila".³⁷

A. Hasjmy juga melihat bahwa, sisa-sila yang terdapat dalam Pancasila *inheren* dengan dasar-dasar negara yang dikehendaki oleh Islam. Adapun konstitusi negara tetap komitmen dengan pendiriannya bahwa, Alquraan sebagai satu-satunya undang-undang dasar negara. Dengan pengertian bahwa Alquran haruslah menjadi pedoman dasar bagi kaum Muslimin, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat dan negara. Di sini, A. Hasjmy nampak sangat dipengaruhi oleh pemahamannya yang mendalam tentang kandungan Alquran . pandangan-pandangan mengenai konsep negara, seperti dapat dilihat

³⁵ Hasan Basri, *Melampaui Islam Substantif: Biografi Politik A. Hasjmy...*, h. 126.

³⁶ Brata, Ida Bagus, Ida Bagus Nyoman Wartha, "Lahirnya Pancasila Sebagai Pemer satu Bangsa Indonesia", *Jurnal Santiaji Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2017): 120-132, http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/J_SP/article/view/800/745.

³⁷ Wawancara dengan ustadh Amir Hamzah pada tanggal 24 Maret 2020.

pada penjelasan-penjelasanannya tentang kosep kenegaraan, selalu dikaitkan dengan sumber dasar ajaran Islam.³⁸

Keberadaan A. Hasjmy, menurut Amir Hamzah,³⁹ tidak hanya menyetujui Pancasila sebagai dasar negara, bahkan ikut mensosialisasikan nilai-nilai pancasila pada masyarakat Aceh. A. Hasjmy salah seorang tutor di BP7 Aceh, yang dikepalai oleh adik kandungnya Asnawi Hasjmy. Gedung tersebut berada di simpang Lima Banda Aceh. A. Hasjmy juga sebagai ketua tim penataran P4 tahun 1980 dan beberapa tahun kemudian. Setiap mahasiswa IAIN Ar-Raniry dan Unsyiah serta yang lainnya, di berbagai jenjang pendidikan wajib mengikuti P4. Bahkan A. Hasjmy tidak setuju negara Islam versi Teungku Muhammad Daod Beureueh. Dan ini, sebagai asumsi bahwa, A. Hasjmy tidak pernah terlibat dalam pemberontakan DI/TII di Aceh, bahkan A. Hasjmy ikut menjadi pelopor utama mendamaikan pemberontakan tersebut dengan pemerintah Republik Indonesia.

Kesimpulan

Dalam pandangan A. Hasjmy Islam dan negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain. A. Hasjmy memandang bahwa Islam tidak dapat disetarakan dengan ideologi negara. Ideologi yang sejalan dengan ajaran agama menurut A. Hasjmy merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Dikarenakan, Islamlah yang seharusnya dijadikan sebagai sumber ideologi, bukan menjadikan agama setara dengan ideologi mana pun. A. Hasjmy tidak pernah mempersoalkan ideologi negara Indonesia, dan tidak pernah mempersoalkan antara Islam dengan Pancasila. Bahkan, dalam berbagai tulisannya A. Hasjmy tidak pernah menyinggung

³⁸ Hasan Basri, *Melampaui Islam Substantif: Biografi Politik A. Hasjmy...*, h. 126.

³⁹ Wawancara dengan ustadh Amir Hamzah pada tanggal 24 Maret 2020.

pentingnya Islam sebagai ideologi negara. A. Hasjmy memandang bahwa Islam merupakan agama yang bersifat universal yang mana nilai-nilainya dapat diterapkan di negara mana pun tanpa harus menamakan Islam secara formalitas.

A. Hasjmy beranggapan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan A. Hasjmy melihat, setiap sila dalam Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ini dapat dilihat dari argumentasi yang diutarakan A. Hasjmy terkait dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan wujud nilai dari surat al-Ikhlâs. Pancasila menurut A. Hasjmy adalah hasil kesepakatan yang dirancang oleh ide-ide orang-orang Islam melalui kajian filosofis yang mana setiap orang terikat dengan agama dan keyakinannya. A. Hasjmy sebagai muslim yang modernis tentunya sebagai muslim pergerakan memiliki kemampuan yang baik dalam menerjemahkan konteks bernegara modern sebagaimana tertuang dalam sistem bernegara Republik Indonesia.

Dialektika Pancasila A. Hasjmy, dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila memuat unsur-unsur tertentu dari demokrasi liberal Barat, sistem Demokrasi Rakyat Sosial, atau sistem Demokrasi Islam atau sistem demokrasi lainnya tidak bertentangan dengan jiwa dan hakikat Pancasila. Unsur-unsur tata-negara menurut ajaran Islam dipahami sebagai penyempurna hukum tata-negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila menuju pembebasan pengaruh hukum warisan kolonial Belanda. Berdasarkan konsepsi negara Islam dengan substansi nilai A. Hasjmy menyetujui Indonesia negara berasaskan Pancasila tanpa membenturkan dengan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Zainal Abidin, *Ilmu Politik Islam II: Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)

- Basri, Hasan, *Melampaui Islam Substantif: Biografi Politik A. Hasjmy*, (Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015)
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998)
- Dhuhri, Saifuddin, *Dayah Menapaki Jejak Pendidikan Warisan Endatu Aceh*, (Banda Aceh: Lhee Sagoe Press, tt.)
- Gazali, A., *Biografi Prof. Teungku Haji Ali Hasjmy*, (Jakarta: Socialia, 1978)
- Hasjmy, A, *Di Mana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)
- Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, *Kisah Pancasila*, (Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017)
- Alchaidar, "Negara, Islam, Dan Nasionalisme Sebuah Perspektif", *Kawistara*, Vol. 3, No. 1, (April 2013): 41-57, <https://b-ok.asia/book/2719895/900473>.
- Brata, Ida Bagus, Ida Bagus Nyoman Wartha, "Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia", *Jurnal Santiaji Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2017): 120-132, <http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/JSP/article/view/800/745>.
- Bagus, Brata, Ida, Ida Bagus Nyoman Wartha, "Lahirnya Pancasila Sebagai Pemer satu Bangsa Indonesia", *Jurnal Santiaji Pendidikan*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2017): 120-132, <http://jurnal.unmas.ac.id/index.php/JSP/article/view/800/745>.
- Fuad, Fokky, "Islam dan Ideologi Pnacasila: Sebuah Dialektika", *Lex Jurnalica*, Vol. 9, No. 3, (Desember 2013): 164-170, <https://fh.uai.ac.id/wp-content/uploads/2016/02/Is-lam-dan-Ideologi-Pancasila-Sebuah-Dialektika-.pdf2012>.

- Harsanyi, Tom P., "Social Democracy," in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (Elsevier, 2015), 242-244, <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780080970868931283>.
- Lapidus, I. M. "State And Religion In Islamic Societies," *Past & Present*, Vol. 151, No. 1, (1996): 3-27, <https://academic.oup.com/past/article-lookup/doi/10.1093/past/151.1.3>.
- Majid, M. Shabri Abd., "Revitalisasi Pendidikan Aceh, *Jurnal Pencerahan*, Vol. 10, No. 2, (September 2016): 62-73, <https://core.ac.uk/download/pdf/289863389.pdf>.
- Mukhlis, Febri Hijroh, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama," *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No. 2, (2016): 171-186, <https://media.neliti.com/media/publications/62019-ID-teologi-pancasila-teologi-kerukunan-umat.pdf>.
- Naim, Ngainun "Islam Dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 2, (Desember 2015): 436-456, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/90>.
- Possamai, Adam and Anthony J. Blasi, "Pancasila," in *The SAGE Encyclopedia of the Sociology of Religion* (2455 Teller Road, Thousand Oaks, California 91320: SAGE Publications, Inc., 2020), <https://sk.sagepub.com/reference/the-sage-encyclopedia-of-sociology-of-religion/i7701.xml>.
- Pryor, Frederic L., "A Buddhist Economic System-in Practice:," *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 50, No. 1 (January 1991): 17-32, <http://doi.wiley.com/10.1111/j.1536-7150.1991.tb02481.x>.
- Ridwan, M. K. "Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi," *Dialogia*, Vol. 15, No. 2,

(2017): 199, <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/1191>.

Rytina, Joan Huber and Ralph Miliband, "The State in Capitalist Society.," *American Sociological Review*, No. 35, No. 5 (October 1970): 931, <http://www.jstor.org/stab93322?origin=crossref>.

Singh, Sherry Ann, "Hinduism and the State in Trinidad," *Inter-Asia Cultural Studies*, Vol. 6, No. 3, (2005): 353-365, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14649370500169987>.

Referensi Youtube

MD., Mahfud, Indonesia Lawyer Club dalam tema "#ILCMenangis dan Tertawa", Pada Tanggal 30 Oktober 2019, <http://bit.ly/2PqGbvB>.

Wawancara

Wawancara dengan ustadh Amir Hamzah pada tanggal 24 Maret 2020. Amir Hamzah adalah salah seorang mahasiswa yang pernah belajar di IAIN (UIN) Ar-Raniry bersama A. Hasjmy, putra Aceh seorang pegiat sejarah, kolumnis, wartawan, politisi, dan juga sebagai ustadh yang mengisi pengajian rutin di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh dengan Materi Sejarah Kebudayaan Islam pada tiap mingguan ba'da subuh hari kamis.